



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JUWANA

Alamat : Jl. Aloon-Aloon No. 1 Juwana Telp. 0295 471003
Kode Pos 59185

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini merupakan kewajiban semua Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juwana, Februari 2023



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Pemerintahan	1
1.2. Kepegawaian.....	6
1.3. Kondisi Geografis Daerah.....	7
1.4. Sistematika Penyajian LKjIP	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Juwana 2017 – 2022.....	17
2.2 Indikator Kinerja.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja	20
2.4 Rencana Anggaran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
3.3 Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	65

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja 2022.





BAB I

PENDAHULUAN

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik .

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1.1 PEMERINTAHAN

Secara administratif, Kecamatan Juwana terdiri dari 29 desa, 35 dukuh, 89 rukun warga, (RW) dan 371 rukun tetangga (RT). Kecamatan Juwana. Kecamatan Juwana dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh sekretaris camat dan beberapa seksi serta kepala desa. Seksi-seksi tersebut terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Ketentraman dan Kertiban Umum
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

5. Seksi Pelayanan

Kantor Kecamatan Juwana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan

a) Tupoksi

1. Tugas Pokok

Organisasi Kantor Kecamatan Juwana adalah salah satu struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi satu wilayah kerja kecamatan dan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan disegala bidang dan pencapaian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat .

Tugas Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 adalah :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;.
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel I.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>usaha industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Tabel I.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

1.2 KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Juwana didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 22 orang sebagai berikut :

Tabel I.3
Sumber Daya Kecamatan Juwana

No	Jab. Struktural/ Jab. Fungsional	Jml	Pangkat/ Gol. Ruang	Jml	Pend Terakhir	Jml
1	2	3	4	5	6	7

1	Camat	1	Pembina / IV a	1	S.2	1
2	Sekretaris Camat	1	Penata Tk. I/ III d	1	S1	1
3	Kepala Seksi	5	Penata Tk. I/ III-d	4	S.1	4
			Penata Muda Tk. I / III-b	1	S2	1
4	Kepala Sub Bagian	2	Penata Tk I / III d	1	S.1	1
			Penata Muda Tk. I /III-b	1	S1	1
5	Staf	4	Penata / III-c	1	S1	1
			Penata Muda / III a	1	SLTA	1
			Pengatur / II d	1	S1	1
			Pengatur Muda / II a	1	SLTP	1
6	Sekdes	9	Pengatur Tk. I /II d	8	SLTA	8
			Penata /II c	1	D III	1

1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.3.1 BATAS ADMINISTRASI

Kecamatan Juwana merupakan salah satu kecamatan yang terletak 12 km ke arah timur Ibukota Kabupaten Pati.yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa
 Sebelah Timur ; Kecamatan Batangan
 Sebelah Selatan : Kecamatan Jakenan
 Sebelah Barat : Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Pati.

1.3.2 LUAS WILAYAH

Luas wilayah Kecamatan Juwana adalah 5.592,598 Ha yang terdiri dari 1.164,622 Ha lahan sawah dan 1.661 Ha lahan bukan sawah serta 4.427,976 Ha lahan bukan pertanian.

1.3.3 TOPOGRAFI DAN MORFOLOGI

Ketinggian daerah Kecamatan Juwana diatas permukaan laut tertinggi adalah 3 m, terendah 1 mdan rata-rata terletak pada ketinggian 2 m.

1.3.4 IKLIM

Tipe iklim dari Kecamatan Juwana adalah E1. Tahun 2016, Kecamatan Juwana tercatat memiliki 101 hari hujan dengan curah hujan tertinggi 452 mm pada Bulan Januari dan curah hujan terendah 0 mm pada Bulan Juli, Agustus, dan September, sedangkan suhu tertinggi pada tahun 2016 adalah 26°C dan suhu terendahnya adalah 24°C.

1.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan

1.4.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Juwana didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.4

Angka Kriminalitas di Kecamatan Juwana

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus narkoba	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus pembunuhan	na	0	0	0	0

	Jumlah kejahatan seksual	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus penganiayaan	na	14	14	5	5
No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus pencurian	na	40	29	27	20
	Jumlah kasus penipuan	na	4	6	4	4
	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	0	0	0	0
	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	58	49	36	29
	Jumlah penduduk	na	93.876	92.992	95.597	95.597
	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	6,18	5,27	3,76	3,03

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan

(Poskamling) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.5
Data Poskamling di Kecamatan Juwana

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	5	0	5
2	Bringin			0
3	Ketip			0
4	Pekuwon	2		2
5	Karang		3	3
6	Karangrejo		20	20
7	Bumirejo		2	2
8	Kedungpancing		3	3

9	Jepuro	1	1	2
10	Tluwah	2	3	5
11	Doropayung	2	3	5
12	Mintomulyo		1	1
13	Gadingrejo	2		2
14	Margomulyo	3		3
15	Langgenharjo		4	4
16	Genengmulyo	3	3	6
17	Agungmulyo	2	3	5
18	Bakaran Kulon		6	6
19	Bakaran Wetan		1	1
20	Dukutalit			0
21	Growong Kidul		3	3
22	Growong Lor	10	11	21
23	Kauman		3	3
24	Pajeksan		3	3
25	Kudukeras			4
26	Kebonsawahan	6		6
27	Bajomulyo	2	5	7
28	Bendar			0
29	Trimulyo	4	8	12
	Jumlah	44	86	130

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.6
Data Anggota Linmas di Kecamatan Juwana

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	18		18
2	Bringin	10		10
3	Ketip	16		16
4	Pekuwon	14		14

5	Karang	21		21
6	Karangrejo	22		22
7	Bumirejo	15		15
8	Kedungpancing	7	3	10
9	Jepuro	5		5
10	Tluwah	6		6
11	Doropayung	21		21
12	Mintomulyo	11		11
13	Gadingrejo	22		22
14	Margomulyo	18		18
15	Langgenharjo	22		22
16	Genengmulyo	13		13
17	Agungmulyo	20		20
18	Bakaran Kulon	20		20
19	Bakaran Wetan	31		31
20	Dukutalit	20		20
21	Growongf Kidul	26		26
22	Growong Lor	34		34
23	Kauman	20		20
24	Pajeksan	10		10
25	Kudukeras	15	5	20
26	Kebonsawahan	4		4
27	Bajomulyo	28		28
28	Bendar	19		19
29	Trimulyo	32		32
	Jumlah	520	8	528

1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Juwana merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Juwana kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.

- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

1.6. Permasalahan dan isu-isu strategis

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Juwana dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;

e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;

f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.7
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Musrenbang desa dan kecamatan
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Juwana 2022 mengacu pada peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Juwana Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issue) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCAAN KINERJA;

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja.:

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bag ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : 1) Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Juwana sebagai institusi dibidang perencanaan sesuai UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menyusun rencana stratejik yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017–2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017–2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik Kantor Kecamatan Juwana yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022.

2.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Juwana 2017 – 2022

Pernyataan Visi menggambarkan masa depan yang diinginkan organisasi yang menerangkan kondisi dan kualitas organisasi tersebut (Popovich : 1999). Visi dapat diartikan sebagai artikulasi dari cita-cita, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi (Werren Bennis dan Michael Mische : 1995). Terkait dengan definisi ini, maka merumuskan visi harus mengandung suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi .

Visi Kantor Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati dalam tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 yakni Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang .

Misi Kantor Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati adalah :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan local;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan; dengan sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Juwana; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - b. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Juwana menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
3. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan;
6. Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
7. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

2.2 INDIKATOR KINERJA

Sebagian besar indikator yang digunakan dalam pelaporan ini diambil dari indikator kinerja daerah yang tertera dalam RPJMD 2017- 2022 beserta dengan proyeksi target tahun 2022 dan target akhir RPJMD 2022, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Didalam mengukur kinerja Kecamatan Juwana Tahun 2022 dipergunakan 18 indikator kinerja utama dari 11 sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari indikator kinerja daerah yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintah daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome).

Perincian penggunaan 18 indikator kinerja dari 11 sasaran sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2022 Kecamatan Juwana adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	75%
		Persentase anggota linmas aktif	99%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0,704
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,735
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,620
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,805
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%

6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3.4
		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%
		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	80%
		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	93%
10	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Pertumbuhan pemohon Paten	0%
11	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Kecamatan Juwana tahun 2022 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kecamatan Juwana yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

Kecamatan Juwana akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022 (Lampiran I), Kecamatan Juwana berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 Kecamatan Juwana.

Sasaran Pertama Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan, diukur dengan 1 (satu) indikator dengan target pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Kinerja Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 program kegiatan yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya **sasaran Kedua** Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, diukur dengan 2 (dua) indikator dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Target Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase pos kamling aktif	75%
2.	Persentase anggota linmas aktif	99%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Ketiga Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Target Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Melalui Upaya Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0,704%
2.	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran Keempat Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, diukur dengan 1 indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Target Kinerja Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,735
2.	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,620
1.	Indeks Ketahanan Lingkungan	0,805

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran Kelima Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target pada tahun 2022 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Target Kinerja Terlaksananya Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%

Untuk mencapai sasaran ini untuk tahun 2022 didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran Keenam Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Target Kinerja Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4
2.	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100 %
1.	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam RKPD Kabupaten	12%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 3 (Tiga) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pembinaan dan Pegawai Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran Ketujuh Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan , diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Target Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran Kedelapan Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Target Kinerja Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	80%
2.	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten	12%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran Kesembilan Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Target Kinerja Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	93%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sasaran Kesepuluh Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11

Target Kinerja Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pertumbuhan pemohon paten	0%

Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen kebijakan umum APBD tahun 2022, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangannya, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, belanja daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 2.474.136.000,- terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.033.000.000,- (atau sebesar 83,21 % dari total anggaran) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 410.136.000,- (atau sebesar 16,79 % dari total anggaran)

Tabel 2.12

Target belanja daerah

Uraian	Target Rp	%
Belanja Pegawai	2.058.409.000	83,18
Belanja barang dan Jasa	416.156.000	16,82
Total Belanja	2.474.565.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program – program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran – sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13

Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun 2022

NO	SASARAN	ANGGARAN	PROSENTASE ANGGARAN (%)
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	25.769.000,-	28,79
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	25.769.000,-	28,79
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	40.842.700,-	45,63
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	40.842.700,-	45,63
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	40.842.700,-	45,63
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	63.739.200,-	10,25

7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	9.172.000,-	10,25
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	54.567.200,-	70,75
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	13.724.500,-	20,12
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	9.172.000,-	10,25
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	9.172.000,-	10,25

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Juwana – Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Juwana untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Juwana - Kabupaten tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap Capaian kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteia Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Juwana tahun 2022. Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja Kecamatan Juwana tahun 2022 tergambar dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN JUWANA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	75%	70%	93,33%
		Persentase anggota linmas	99%	99%	100%

		aktif			
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.709	0,7493	106%
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.735	0,817	111%
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.620	0,688	111%
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.805	0,742	92%
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3.4	3,5	103%
		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	100%

		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%	12%	100%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	80%	80%	103%
		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%	12%	100
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	93%	93%	100%
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Pertumbuhan pemohon Paten	0%	0,51%	Tak terhitung
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Pengukuran sasaran dari tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Juwana adalah dengan membandingkan antara target dengan realisasi yang telah dicapai selama satu tahun sebagai berikut:

Sasaran Pertama

Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.

Kecamatan Juwana berupaya mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini diukur dengan menggunakan 1(satu) indikator kinerja yaitu persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat yang tertib,
memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase Penanganan Pelanggaran K3 di Kecamatan	100%	100%	100%

Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan dihitung dengan cara jumlah kasus kriminalitas yang tertangani selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah angka kriminalitas yang terjadi selama satu tahun. Pada tahun 2022 kasus kriminalitas yang tertangani sebanyak 81 kasus dari keseluruhan jumlah kasus kriminalitas sebanyak 81 kasus. Jadi realisasi kinerja tahun 2022 tercapat 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Kasus kriminalitas yang terjadi tahun 2022 yaitu kasus penipuan sebanyak 6 kasus, kasus penganiayaan sebanyak 36 kasus, kasus pencurian sebanyak 36 kasus dan kasus perjudian sebanyak 3 kasus.

Sasaran Kedua

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban tercermin pada 2 (dua) capaian indikator kinerja yaitu persentase pos kamling aktif, dan persentase anggota linmas aktif.

Tabel. 3.4

Capaian Kinerja Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase pos kamling aktif	75%	70%	93%
Persentase anggota linmas aktif	99%	99%	100%

Capaian indikator persentase pos kamling aktif pada tahun 2022 sebesar 70%. Indikator persentase pos kamling aktif dihitung dari jumlah pos kamling aktif dibagi dengan jumlah pos kamling yang ada. Untuk tahun 2022 dari 29 desa jumlah pos kamling yang aktif sebesar 91 dari jumlah pos kamling yang ada sebanyak 130 poskamling. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 70%. dari yang ditargetkan sebesar 75%. Capaian indikator kinerja ini kurang sedikit dari target yang telah ditetapkan karena jumlah pos kamling yang aktif di Kecamatan Juwana selama tahun 2022 ada penambahan sedikit. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pos kamling untuk menjaga keamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

Capaian indikator persentase anggota linmas aktif pada tahun 2022 sebesar 99%. Indikator persentase anggota linmas aktif dihitung dari jumlah anggota linmas aktif dibagi dengan jumlah anggota linmas yang ada. Untuk tahun 2022 dari 29 desa jumlah anggota linmas yang aktif sebesar 523 dari jumlah anggota linmas yang ada sebanyak 528. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 99% dari yang ditargetkan sebesar 99%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dari target yang telah ditetapkan karena adanya peningkatan jumlah anggota linmas yang aktif.

Sasaran Ketiga

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tercermin pada 2 (dua) capaian indikator kinerja yaitu, Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan dan Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
-------------------	---	---	---------

Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0,704	0,749	111%
Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%

Capaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan pada tahun 2022 sebesar 0,749. Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan dihitung dari jumlah IKE, IKS dan IKL (rata-rata kecamatan) dibagi 3. Untuk tahun 2022 dari 29 desa Jumlah rata-rata IKE sebesar 0,688, IKS sebesar 0,817 dan IKL sebesar 0,742. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 0,749 dari yang ditargetkan sebesar 0,704. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat tinggi yaitu 111 % melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2022 sebesar 100%. Indikator persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2022 dihitung dari jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dibagi dengan jumlah bantuan sosial keseluruhan. Untuk tahun 2022 bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat secara keseluruhan sebesar Rp.18.033.450.000,- yang terdiri dari bantuan BPNT sebesar Rp.8.191.050.000,- bantuan PKH sebesar Rp.8.191.050.000,- dan bantuan keagamaan sebesar Rp.288.000.000,-. Jumlah bantuan sosial ini tersalur seluruhnya kepada kemasyarakatan.

Sasaran Keempat

Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan tercermin pada 3 (tiga) capaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks ketahanan Lingkungan (IKL).

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
-------------------	---	---	---------

Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,735	0,817	111%
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,620	0,688	111%
Indeks ketahanan Lingkungan (IKL)	0,805	0,742	92%

Capaian indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) pada tahun 2022 sebesar 0,817. Indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dihitung dari jumlah IKS seluruh desa se-Kecamatan Juwana dibagi jumlah desa. Untuk tahun 2022 jumlah keseluruhan IKS desa sejumlah 23,7030 dibagi jumlah desa sebanyak 29. Jadi kalau dihitung maka capain indikator kinerja sebesar 0,817% dari yang ditargetkan sebesar 0,709. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat tinggi yaitu 111%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja sasaran ini tahun 2021 sudah melebihi. Walaupun begitu masih perlu dilakukannya pengawasan, evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan peran serta BUMDES dan lembaga kemasyarakatan.

Capaian indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) pada tahun 2022 sebesar 0,688. Indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKE) dihitung dari jumlah IKE seluruh desa se-Kecamatan Juwana dibagi jumlah desa. Untuk tahun 2022 jumlah keseluruhan IKE desa sejumlah 19,950 dibagi jumlah desa sebanyak 29. Jadi kalau dihitung maka capain indikator kinerja sebesar 0,688% dari yang ditargetkan sebesar 0,620. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat tinggi yaitu 111%.

Capaian indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKL) pada tahun 2022 sebesar 0,742. Indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKL) dihitung dari jumlah IKL seluruh desa se-Kecamatan Juwana dibagi jumlah desa. Untuk tahun 2022 jumlah keseluruhan IKL desa sejumlah 21,533 dibagi jumlah desa sebanyak 29. Jadi kalau dihitung maka capain indikator kinerja sebesar 0,749 dari yang ditargetkan sebesar 0,805. Capaian indikator kinerja ini masuk kategori sangat tinggi yaitu 92%.

Sasaran kelima

Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase persentase total ketercapaian

penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%

Untuk tahun 2022 capaian indikator persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan mencapai 100%. Indikator persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan dihitung dari jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dibagi dengan jumlah penerima keseluruhan dalam daftar kali 100%. Untuk tahun 2022 jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) sejumlah 6.672 dari penerima keseluruhan dalam daftar sebanyak 6.672. Jumlah penerima bantuan BPNT sebanyak 3.981 orang, jumlah penerima bantuan PKH sebanyak 2.307 orang jumlah penerima bantuan keagamaan sebanyak 384 tempat ibadah. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan tahun 2022 termasuk kategori sangat tinggi sebesar 100%.

Sasaran Keenam

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan tercermin pada 3 (dua) capaian indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan

Masyarakat Kecamatan, Persentase Realisasi Capaian RKPDes dan Persentase usulan yang masuk dalam RKPD kabupaten.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,4	3,5	103%
Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	100%
Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%	12%	100%

Capaian indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2022 sebesar 3,5. Indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan dihitung dari data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk tahun 2022 data hasil survey kepuasan masyarakat sejumlah 3,5. Jadi kalau dihitung maka capaian indikator kinerja sebesar 3,5 dari yang ditargetkan sebesar 3,4. Capaian indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan termasuk kategori sangat tinggi yaitu 103%.

Capaian indikator persentase Realisasi Capaian RKPDes pada tahun 2022 sebesar 100%. Indikator persentase Realisasi Capaian RKPDes dihitung dari jumlah dokumen RKPDes yang tersusun dibagi jumlah desa se kecamatan Juwana kali 100%. Untuk tahun 2022 jumlah dokumen RKPDes yang tersusun sejumlah 29 dari jumlah desa se kecamatan Juwana sejumlah 29 desa. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan termasuk kategori sangat tinggi.

Capaian indikator persentase usulan kecamatan yang masuk di RKPD Kabupaten pada tahun 2022 sebesar 100%. Indikator persentase usulan kecamatan yang masuk di RKPD Kabupaten dihitung dari jumlah usulan kecamatan yang terealisasi dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan kecamatan

kali 100%. Untuk tahun 2022 jumlah usulan kecamatan yang terealisasi dalam RKPD sejumlah 2 dari jumlah jumlah usulan kecamatan sejumlah 16. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 12% dari yang ditargetkan sebesar 12%. Capaian indikator kinerja ini mencapai target yang telah ditetapkan dan masuk kategori sangat tinggi yaitu sebesar 100%.

Sasaran ketujuh

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

INDIKATOR KINERJA ¹	T	R	CAPAIAN
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100%. Indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dihitung dari jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan kali 100%. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 8.306 sedangkan jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan sebesar 8.306. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan masuk kategori sangat tinggi.

Sasaran kedelapan

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Pemenuhan kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	80%	80%	100%
Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%	12%	100%

Capaian indikator persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan pada tahun 2022 sebesar 100%. Capaian Indikator keterisian data monografi dan profil kecamatan dihitung dari jumlah data monografi dan profil kecamatan yang terisi dibagi jumlah seluruh data monografi dan profil kecamatan kali 100%. Persentase keterisian data monografi kecamatan = Jumlah data monografi yang terisi (41) /Jumlah monografi keseluruhan (50) x 100% =82% sedangkan persentase profil kecamatan = jumlah data profil yang terisi (23) / Jumlah data profil kecamatan keseluruhan (29) x 100% = 79%. Jadi persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan = (82%+79%)/2 = 80. Jadi capaian indikator kinerja sebesar 80% dari dari yang ditargetkan sebesar 80%, kalau diprosentase mencapai 100% termasuk kategori sangat tinggi.

Sasaran kesembilan

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Untuk mewujudkan tertib administrasi pelaporan keuangan desa tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib.

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	93%	93%	100%

Capaian indikator persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib pada tahun 2022 sebesar 93%. Indikator persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib dihitung dari jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib dibagi jumlah semua desa kali 100%. Jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib sejumlah 27 sedangkan jumlah semua desa sejumlah 29. Jadi kalau diprosentase maka capaian indikator kinerja sebesar 93% dari yang ditargetkan sebesar 93% sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan dan termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah desa yang administrasi pengelolaan yang tertib mengalami penambahan satu desa pada tahun 2022.

Sasaran kesepuluh

Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu pertumbuhan pemohon paten.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Pertumbuhan pemohon paten	0%	0,51%	Tak terhitung

Capaian indikator pertumbuhan pemohon paten pada tahun 2022 sebesar 0,53%. Indikator pertumbuhan pemohon paten dihitung Jumlah pemohon tahun n dikurangi jumlah pemohon tahun n-1 dibagi jumlah pemohon tahun n-1 x 100%. Jadi kalau dihitung $(1557-1549)/1549 \times 100\%$ maka capaian indikator kinerja sebesar 0,53% dari yang ditargetkan sebesar 0%. Capaian indikator kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu tak terhitung dan termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah pemohon pelayanan paten mengalami penambahan pada tahun 2022.

Sasaran kesebelas

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan

Untuk Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan di kecamatan tercermin pada 1 (satu) capaian indikator kinerja yaitu persentase pelayanan perijinan tepat waktu.

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian indikator Persentase pelayanan perijinan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100%. Indikator Persentase pelayanan perijinan tepat waktu dihitung Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan x 100%. Jadi kalau dihitung $1557/1557 \times 100\%$ maka capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini sama dengan target yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja ini mencapai 100 %, termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini

disebabkan karena adanya pelayanan yang prima dan baik terhadap pemohon pelayanan paten di Kecamatan Juwana

3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi kinerja tahun ini dengan tahun – tahun sebelumnya

Merupakan perbandingan capaian realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juwana tahun 2022 dengan tahun – tahun sebelumnya . Perbandingan Capaian realisasi kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan, indikator kinerja sasaran ini adalah persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan selama setahun. Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan Juwana, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.14

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021 Persentase Penanganan Pelanggaran K3 di Kecamatan 100%, sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 sesuai dengan capaian indikatornya sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya maka Persentase Penanganan Pelanggaran K3 di Kecamatan tahun 2022 kondisinya sama dengan tahun sebelumnya. Semua kasus kriminalitas yang terjadi dapat ditangani dengan baik. Dapat kami sampaikan di sini jumlah kasus kriminalitas yang terjadi dan jumlah kasus yang diselesaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rekapitulasi jumlah kasus kriminal Kecamatan Juwana
Tahun 2018-2022

NO	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus narkoba	1				
2.	Jumlah kasus penipuan	4	2	1		6
3.	Jumlah kasus pemalsuan merk		1		2	
4.	Jumlah kasus penganiyaan	2	2	5	4	36
5.	Jumlah kasus pencurian	6	7	18	5	36
6.	Jumlah kasus KDRT			1		
7.	Jumlah kasus perjudian		1			3
	Jumlah kasus	13	13	25	11	81

Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, capaian indikator sasaran ini adalah persentase pos kamling aktif, dan persentase anggota linmas aktif, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pos kamling aktif	%	35,38%	36,92%	36,92%	57,69%	70%
Persentase anggota linmas aktif	%	98,48%	98,48%	98,48%	99%	99%

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021 Persentase pos kamling aktif 35,38%, 36,92%, 36,92% dan 57,69 sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 75% terealisasi 70%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 93%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian kinerja sasaran mengalami kenaikan.

Untuk persentase anggota linmas aktif kondisi pada tahun 2018 sampai dengan 2021 masing-masing adalah 98%, 98,48%, 98,48 dan 99%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 99% terealisasi 99%. Capaian indikator untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sama, karena tidak ada penambahan jumlah anggota linmas aktif, sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan karena ada penambahan jumlah anggota linmas aktif.

Sasaran 3: Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, capaian indikator sasaran ini adalah Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan, dan Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	angka	0,664	0,694	0,699	0,715	0,749
Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021, capaian indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan 0,664, 0,694, 0,699, dan 0,715 dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,665, 0,694, 0,699 dan 0,704. sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 0,709 terealisasi 0,749%. Persentase capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah 100%, 100%, 100% dan 93,99%. Persentase Capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan 2021 masuk kategori sangat tinggi. Begitu juga capaian kinerja sasaran tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 106%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capain kinerja sasaran ini mengalami kenaikan terus.

Untuk capaian indikator kinerja bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat kondisi pada tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar 100% begitu juga pada tahun 2022 terealisasi 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya maka capaian kinerja sasaran ini tahun 2022 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena bantuan

sosial yang ada tersalur sepenuhnya, Dari jumlah bantuan sebesar Rp.18.033.450.000,- tersalur semuanya ke 6.672 penerima.

Sasaran 4: Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Tabel 3.18

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	angka	0,732	0,768	0,669	0,771	0,817
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	angka	0,638	0,668	0,651	0,662	0,688
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	angka	0,632	0,646	0,699	0,687	0,742

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Data Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 0,732, 0,768, 0,669 dan 0,771 sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 0,709 terealisasi 0,817. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 111%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja sasaran ini mengalami kenaikan terus.

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Data Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,638, 0,668, 0,651 dan 0,662 sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 0,620 terealisasi 0,688. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 111%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sasaran ini mengalami penurunan.

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Data Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,742, 0,646, 0,699 dan 0,687 sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 0,805 terealisasi 0,742. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 92%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kinerja sasaran ini mengalami kenaikan terus kecuali tahun 2021 yang sempat mengalami penurunan.

Sasaran 5: Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

Tabel 3.19

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021 capaian indikator Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan mencapai 100%, demikian juga pada tahun 2022 ini terealisasi 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%.

Sasaran 6: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Tabel 3.20

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka	3	3,20	3,24	3,27	3,5
Persentase Realisasi Capaian RKPDes	%	100	100	100	100	100
Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	%	6	20%	0%	0%	12

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan nilainya 3, 3,20, 3,24 dan 3,5 sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 3,4 terealisasi 3,5. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 indek kepuasan masyarakat 2022 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja ASN terhadap pelayanan terhadap masyarakat.

Capaian kinerja sasaran tahun 2022 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 103%.

Berdasarkan kondisi 2018 sampai dengan 2021 Persentase Realisasi Capaian RKPDes mencapai 100%. Begitu juga pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian indikatornya sebesar 100% yang mana ini termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini berarti semua desa melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RKPDes sebagai syarat tertibnya administrasi walaupun kadang masih ada desa yang terlambat dalam penyusunan dokumen RKPDes.

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021, Persentase usulan kecamatan yang masuk di RKPD Kabupaten 6%, 20%, 0% dan 0%. Sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 12% terealisasi 12%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran yang begitu signifikan dalam rangka mendukung program penanggulangan covid-19, sehingga usulan kecamatan dari hasil musenbang kecamatan hanya sedikit yang masuk di RKPD kabupaten.

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

. Tabel 3.21

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021, Capaian indikator kinerja pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 100% sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 termasuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%.

Sasaran 8 : Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tabel 3.22

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	%	64	69,04	72,5	77,21	80
Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	%	6	20	0	0	12

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai 2021, Capaian indikator kinerja persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan sebesar 64%, 69,04%, 72,5% dan 77,21, sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 80% terealisasi 80%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%. Jika dibandingkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, maka persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan tahun 2022 mengalami kenaikan.

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021, capaian indikator kinerja Persentase usulan kecamatan yang masuk di RKPD Kabupaten 6%, 20%, 0% dan 0%. sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 12% terealisasi 12%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran yang begitu signifikan dalam rangka mendukung program penanggulangan covid-19, sehingga usulan kecamatan dari hasil musenbang kecamatan tidak ada yang masuk di RKPD kabupaten.

Sasaran 9 : Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Tabel 3.23

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	%	80	86	86	90	93

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai 2021, capaian indikator kinerja Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib sebesar 80%, 86%, 86% dan 90% sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 93% terealisasi 93%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian kinerja persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib mengalami kenaikan. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 100%.

Sasaran 10 : Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan

Tabel 3.24

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan pemohon paten	%	0,004	-15%	-31%	8,17	0,51

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021, capaian indikator kinerja pertumbuhan pemohon paten sebesar 0,004%, -15%, -31% dan 8,17%. Sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 0% terealisasi 0,51%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian kinerja

tahun 2022 mengalami penurunan dan juga kenaikan. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya tidak terhingga karena pembagiannya nol.

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan

Tabel 3.25

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan

INDIKATOR KINERJA	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Berdasarkan kondisi tahun 2018 sampai dengan 2021, pertumbuhan pemohon paten sebesar 100%, 100%, 100% dan 100%. Sedangkan pada tahun 2022 ini target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 100%. Capaian kinerja sasaran tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan capaian indikatornya 100 %.

4. Perbandingan antara realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan

TABEL 3.26

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan	%	100	100	100	100	100

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 100% maka capaian kinerja tahun 2022 yang sebesar 100% sudah mencapai target jangka menengah yang telah ditentukan.

Sasaran 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

TABEL 3.27

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase pos kamling aktif	%	75	70	93%	75	93%
Persentase anggota linmas aktif	%	99	99	100%	99	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang direncanakan sebesar 75%, maka capaian indikator kinerja sasaran persentase pos kamling aktif tahun 2022 masih perlu ditingkatkan. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mencapai kondisi seperti target jangka menengah adalah pembinaan kepada aparat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pos kamling.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 99%, maka capaian kinerja sasaran tahun 2021 ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan dalam jangka menengah. Walaupun begitu kita tetap perlu mempertahankan capaian kinerja sasaran ini agar tidak mengalami penurunan.

Sasaran 3: Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

TABEL 3.28

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	angka	0,709	0,749	106	0,709	106
Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 0,709, maka capaian indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan pada tahun 2022 sudah melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,749 dengan persentase capaian kinerja sebesar 106 %. Langkah langkah untuk mencapai target jangka menengah masih perlu dilaksanakannya pembinaan dan monitoring dan meningkatkan peran serta BUMDES dan lembaga kemasyarakatan sehingga status Desa Mandiri semakin banyak.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator kinerja Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat tahun 2022 sudah mencapai target. Walaupun begitu masih perlu dilakukannya pengawasan, evaluasi yang diperlukan agar bantuan sosial tersalur sepenuhnya dengan sesuai sasaran.

Sasaran 4: Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

TABEL 3.29
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	angka	0,735	0,817	111%	0,735	111%
Indeks Ketahanan Ekonomi	angka	0,620	0,688	111%	0,620	111%
Indeks Ketahanan Lingkungan	angka	0,805	0,742	92%	0,805	92%

Bila dibandingkan dengan jangka menengah yang ditargetkan sebesar 0,735, maka capaian indikator kinerja ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang diperlukan agar dapat mencapai target jangka menengah yaitu memotivasi/mendorong lembaga kemasyarakatan agar lebih produktif dan meningkatkan peran serta BUMDes.

Bila dibandingkan dengan jangka menengah yang ditargetkan sebesar 0,620, maka capaian indikator kinerja ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang diperlukan agar dapat mencapai target jangka menengah yaitu memotivasi/mendorong lembaga kemasyarakatan agar lebih produktif dan meningkatkan peran serta BUMDes.

Bila dibandingkan dengan jangka menengah yang ditargetkan sebesar 0,805, maka capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang diperlukan agar dapat mencapai target jangka menengah yaitu memotivasi/mendorong lembaga kemasyarakatan agar lebih produktif dan meningkatkan peran serta BUMDes.

Sasaran 5: Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

TABEL 3.30
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	%	100	100	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi capaian indikator ini sudah mencapai target yaitu 100%. Namun demikian masih diperlukan pengawasan dan monitoring secara berkala agar penyaluran bantuan tepat waktu dan sesuai dengan sasaran.

Sasaran 6 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

TABEL 3.31
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	3,4	3,5	103%	3,4	103%
Persentase Realisasi Capaian RKPDes	%	100	100	100%	100	100%
Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam RKPD Kabupaten	%	12	12	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 3,4 maka capaian kinerja 2022 yang terealisasi 3,5 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada akhir jangka menengah. Walaupun begitu mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat masih tetap harus ditingkatkan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang 100%, maka realisasi capaian kinerja ini tahun 2022 sudah memenuhi target. Walaupun begitu kita tetap melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi agar desa selalu melaksanakan kewajiban menyusun RKPDes sesuai standart dan tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator 2022 yang sebesar 12% ini sudah mencapai target jangka menengah yaitu 12%. Kami harap covid-19 segera berlalu sehingga untuk tahun berikutnya anggaran untuk mengcover usulan kecamatan hasil musrenbang kecamatan. Di samping itu diperlukan langkah-langkah agar desa mengajukan usulan anggaran yang berpotensi untuk lolos di Musrenbang kabupaten.

Sasaran 7: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

TABEL 3.32

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	100	100	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 100%, capaian indikator tahun 2022 sudah memenuhi target. Dengan kondisi seperti ini Kecamatan Juwana tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, cepat dan tepat waktu.

Sasaran 8 : Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

TABEL 3.33
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	%	80	80	100%	80	100%
Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	%	12	12	100%	12	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang sebesar 80%, maka realisasi capaian indikator kinerja persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan tahun 2022 yang sebesar 80% sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target jangka menengah maka diperlukan langkah-

langkah pembinaan dan pendampingan ke desa –desa agar tertib administrasi sehingga data yang diperlukan sewaktu-waktu tersedia.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten tahun 2022 yang sebesar 12% ini sudah mencapai target jangka menengah yaitu 12%. Kami harap covid-19 segera berlalu sehingga untuk tahun berikutnya anggaran untuk mengcover usulan kecamatan hasil musrenbang kecamatan. Di samping itu diperlukan langkah-langkah agar desa mengajukan usulan anggaran yang berpotensi untuk lolos di Musrenbang kabupaten.

Sasaran 9 : Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Tabel 3.34

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	%	80	80	100%	80	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator 2022 yang sebesar 93% ini sudah mencapai target jangka menengah yaitu 93%. Walaupun begitu pembinaan pengelolaan keuangan desa masih perlu dilakukan sehingga diharapkan kedepannya semua desa melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dengan tertib.

Sasaran 10 : Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan

Tabel 3.35

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Pertumbuhan pemohon paten	%	0	0,51	Tak terhingga	0	Tak terhingga

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator 2022 yang sebesar 0,51% ini melebihi target jangka menengah yaitu 0%. Karena itu sosialisasi pelayanan paten dan kewenangan kecamatan dalam memberikan pelayanan paten perlu ditingkatkan sehingga pertumbuhan pemohon paten meningkat.

Sasaran 11: Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan

Tabel 3.36

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022	Target Jangka Menengah	Prosentase capaian kinerja
		Target	Realisasi			
Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	%	100	100	100%	100	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator 2022 yang sebesar 100% mencapai target jangka menengah yaitu 100%. Karena itu pelayanan perijinan tepat waktu perlu dipertahankan sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan kecamatan Juwana.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.37

Data Analisis Sasaran beserta penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	Adanya sinergitas koordinasi antara muspika tingkat kecamatan, kecamatan dan desa dalam menangani kasus pelanggaran K3 di Kecamatan	Masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan kejadian perkara ke Pihak berwajib	Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, muspika tingkat kecamatan dan desa
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif		Pos kamling yang ada di desa belum semuanya aktif	Koordinasi dengan desa untuk menggerakkan masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling yang ada
		Persentase anggota linmas aktif	Anggota linmas yang ada aktif dalam setiap kegiatan desa		Koordinasi dengan desa agar tetap melibatkan linmas dalam menjaga keamanan lingkungan
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	Meningkatkan peran BUMDES dan lembaga organisasi masyarakat agar usaha kecil berkembang	Peran BUMDES dan lembaga organisasi masyarakat belum optimal	Melaksanakan moitoring, pembinaan kepada BUMDes dan lembaga organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat

		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Melaksanakan pemutakhiran data Melakukan monitoring dan koordinasi terkait dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat (BPNT, PKH dan keagamaan)	Data tergantung dari pusat, penerima kadang tidak sesuai sasaran	Melaksanakan koordinasi dengan desa secara berkala untuk mengadakan pemutakhiran data penerima bantuan sosial Monitoring penyaluran bantuan sosial
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Masih perlu ditingkatkannya peran BUMDES dan lembaga organisasi masyarakat untuk mendorong berkembangnya usaha kecil	Peran BUMDES dan lembaga organisasi masyarakat desa belum maksimal dan SDM masih rendah	Melaksanakan moitoring, pembinaan kepada BUMDes dan lembaga organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	Melakukan monitoring dan koordinasi terkait dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat (BPNT, PKH dan keagamaan)	Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat penerima BPNT, bantuan PKH dan bantuan keagamaan	Melakukan monitoring dan koordinasi terkait dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat (BPNT, PKH dan keagamaan)
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Adanya pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan paten di Kecamatan	Gedung dan sarana prasarana pelayanan belum representatif	Tetap mengoptimalkan pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan paten di Kecamatan dengan kondisi gedung, sarana dan prasarana yang ada
		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	Secara berkala diadakan evaluasi ke desa	Kurangnya kompetensi SDM pengelola administrasi keuangan desa	Secara berkala tetap diadakan evaluasi pelaksanaan RKPDes ke desa

		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Mengawasi usulan sampai di Musrenbang Kabupaten	Jumlah APBD yang terbatas sehingga tidak cukup mengakomodir semua usulan masyarakat	Mengawal usulan masyarakat dengan memilih usulan yang benar-benar prioritas
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Adanya pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan kependudukan di Kecamatan	Pelayanan kependudukan hanya sebagian yang dilimpahkan kepada kecamatan	Meningkatkan pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan kependudukan di Kecamatan
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	Mengintensifkan data dari desa	Desa kurang update dalam melaksanakan administrasi data monografi dan profil	Monitoring dan melaksanakan pembinaan perangkat desa dalam melaksanakan administrasi data
		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Mengawasi usulan sampai di Musrenbang Kabupaten	Jumlah APBD yang terbatas sehingga tidak cukup mengakomodir semua usulan masyarakat	Mengawal usulan masyarakat dengan memilih usulan yang benar-benar prioritas
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	Mengawal dan mengoptimalkan kinerja Pendamping Desa	SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang mem	Kecamatan bersama pendamping desa melaksanakan monitoring dan pembinaan tentang pengelolaan administrasi keuangan desa
10	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Pertumbuhan pemohon Paten	Optimalisasi pelayanan administrasi perizinan kecamatan di segala aspek	Pelayanan perizinan ditarik kembali ke Kabupaten sehingga jumlah pemohon perizinan Paten ditingkat kecamatan berkurang	Tetap melaksanakan Optimalisasi pelayanan administrasi perizinan kecamatan di segala aspek
11	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	Adanya pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan paten di Kecamatan		Meningkatkan pelayanan prima dan baik terhadap pemohon pelayanan paten di Kecamatan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Juwana, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan langkah – langkah yang terencana dan terpola. Dengan melakukan langkah – langkah yang terencana dan terpola sumber daya akan dapat digunakan secara tepat anggaran dan tepat sasaran. Efisiensi akan dapat menumbuhkan sumber daya yang kreatif dan akuntabel sehingga mampu melakukan kegiatan dengan cermat dan akuntabel.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan solusi kegagalan/atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi dari setiap sasaran

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan solusi kegagalan/atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi dari setiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.38

Rekapitulasi Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTAS E ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25,769,000	28.79	25.766.500,-
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25,769,000	28.79	25.766.500,-
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40,842,700	45.63	40.725.200,-
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40,842,700	45.63	40.725.200,-

5	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40,842,700	45.63	40.725.200,-
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	9,172,000	10.25	9.157.000,-
		Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	13,724,500	15.33	13.717.000,-
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40,842,700	45.63	40.725.200,-
7	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	9,172,000	10.25	9.157.000,-
8	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	13,724,500	15.33	13.717.000,-
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40,842,700	45.63	40.725.200,-
9	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	13,724,500	15.33	13.717.000,-
10	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	9,172,000	10.25	9.157.000,-
11	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	9,172,000	10.25	9.157.000,-

Untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, ditunjang oleh 1 program yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp.25.769.000,- atau 28,79% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi sebesar Rp.25,766.500,-

Dengan capaian kinerja 93% - 100%, penggunaan anggaran dalam rangka Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan dan meningkatnya peran serta masyarakat

dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dinilai efisien karena dari anggaran Rp. 25.769.000,- terealisasi Rp. 25,766.500,- atau terserap 97,86%, efisiensi sebesar Rp.2.500,-

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat ditunjang oleh 1 program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp.40.842.700,- atau 45,63% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi sebesar Rp.40,725.200,-

Dengan capaian kinerja 92% - 111%, penggunaan anggaran dalam rangka Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan dinilai efisien karena dari anggaran Rp.40.842.400,- terealisasi Rp. 40.725.200,- atau terserap 99,71%, efisiensi sebesar Rp.117.500,-

Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan ditunjang oleh 3 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Program Pemberdayaaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun anggaran masing–masing program yang mendukung adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp.9.172.000 atau 10,25 dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi Rp.9.157.000,-
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp.40.842.700,- atau 45,63% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi sebesar Rp.40,725.200,-
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp.13.724.500,- atau 15,33% dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi Rp.13.717.000,-

Dengan capaian kinerja 100% - 103%, penggunaan anggaran dalam rangka Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan,

dinilai efisien karena dari anggaran Rp.63.739.200,- terealisasi Rp.63,599.200,- atau terserap 99,78%, efisiensi sebesar Rp.140.000,-

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan, Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan, dan meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik dengan anggaran Rp.9.172.000 atau 10,25 dari anggaran langsung untuk mendukung program prioritas dan terealisasi Rp.9.157.000,-

Dengan capaian kinerja 100% - tak terhingga, penggunaan anggaran dalam rangka Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan dinilai efisien karena dari anggaran Rp.9.172.000,- terealisasi Rp.9.157.000,- atau terserap 99,83%, efisiensi sebesar Rp.15.000,-

3.3 REALISASI ANGGARAN

Total anggaran belanja Kecamatan Juwana Tahun 2022 Rp.2.474.565.000,- dengan perincian belanja pegawai Rp.2.058.409.000,- dan belanja barang jasa sebesar Rp.416.156.000,-

Tabel 3.39

Anggaran Belanja Kecamatan Juwana

URAIAN	ANGGARAN	%
Belanja Pegawai	2.058.409.000,-	83,18

Belanja barang dan jasa	416.156.000,-	16,82
Total Belanja	2.474.565.000,-	100

Total realisasi belanja 2022 sebesar Rp.2.294.621.533,- dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 1.892.664.495,- dan belanja barang jasa sebesar Rp.401.957.038,-

Belanja langsung yang utama untuk program-program prioritas sebesar Rp.89.508.200,-. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 99,89%. Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan dan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban menyerap anggaran tertinggi belanja prioritas (99,96%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ketujuh sampai sasaran kesepuluh (97,53%).

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.40
Realisasi Anggaran Belanja Prioritas (dalam rupiah) Tahun 2022

NO	SASARAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI	%
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	25.769.000	25.766.500	99,99
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban			
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	63.739.200	63.599.200	99,78
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan			
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan			

8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan			
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan			
	TOTAL	89.508.200	89.365.700	
	Rata rata realisasi			99,88
	Realisasi Tertinggi			99,99
	Realisasi Terendah			91,53

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana-Kabupaten Pati tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran dengan target indikator yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati 2022 merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Juwana 2017 – 2022 dalam mengelola kepercayaan masyarakat kabupaten.

Bila dilihat pengukuran indikator yang digunakan dalam menilai kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, indikator tercapai dengan kriteria tinggi, terbanyak efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sakip sebagai sistem diharapkan dapat memberikan sarana bagi pengampu kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya.

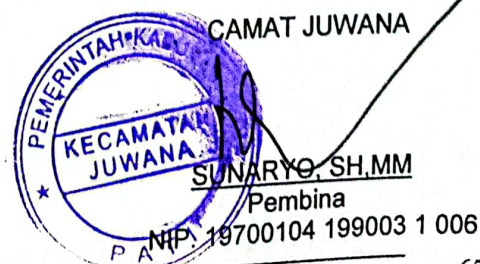
Secara umum hal yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan kinerja yang sangat tinggi ini, Kecamatan Juwana dalam kedepan dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan budaya kerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan review kinerja secara berkala:
- b. Meningkatkan kualitas kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan didukung oleh program dan kegiatan Kecamatan Juwana:
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja:
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi internal sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan anggaran:
- e. Meningkatkan kualitas basis data sehingga proses perencanaan maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Juwana tahun 2020 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh Stakeholder, dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akan memberikan dampak lebih luas pada kemajuan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dengan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Juwana, Februari 2023

CAMAT JUWANA
SUNARYO, SH,MM
Pembina
NIP. 19700104 199003 1 006





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARYO, SH,MM
Jabatan : Camat Juwana Kabupaten Pati
NIP : 19700104 199003 1 006

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, S.H, M.M, M.Si
Jabatan : Bupati Pati

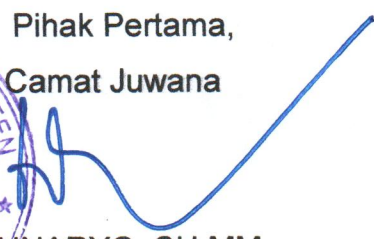
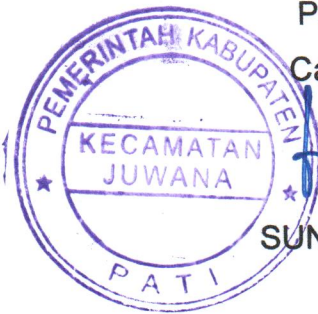
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Bupati Pati

HARYANTO, S.H, M.M, M.Si

Pati, 20 Januari 2022
Pihak Pertama,
Camat Juwana


SUNARYO, SH,MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan5	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	75%
		Persentase anggota linmas aktif	99%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.704
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.735
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.620
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.805
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%

6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3.4
		Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%
		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	80%
		Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	12%
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	93%
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Pertumbuhan pemohon Paten	0%
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.172.000	APBD KAB

- | | | | |
|----|--|----------------|----------|
| 2. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 40.842.700 | APBD KAB |
| 3. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 25.769.000 | APBD KAB |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 13.724.500 | APBD KAB |

Pati, 20 Januari 2022


Pihak Kedua,
Bupati Pati



[Handwritten signature]

HARYANTO, S.H, M.M, M.Si

Pihak Pertama,
Camat Juwana



[Handwritten signature]

SUNARYO, SH, MM